

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya guna melanjutkan dan mempertahankan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia selalu dalam kondisi lemah. Sifat lemah yang dibawa oleh manusia ditegaskan oleh firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّقَ عَنْكَ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا (النساء: ٢٨)

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah" (DEPAG RI, 1986 : 122 )

Ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain disebabkan oleh dua faktor : pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia, yang hanya dapat diwujudkan dengan adanya pergaulan antara orang laki-laki dengan orang perempuan; kedua, saling membantu dalam menyediakan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak.

Keterlibatan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia menimbulkan interaksi dan interrelasi dalam bentuk kerja sama dan saling membantu yang menimbulkan rasa saling membutuhkan antar sesama, dan akhirnya sepakat untuk bermasyarakat/bernegara.

Kebutuhan yang kuat dan keinginannya untuk bergaul menjadikan individu sebagai satuan dasar dari millat (komunitas atau bangsa), yang antara individu itu sendiri dengan komunitas/bangsanya terdapat hubungan yang interdependensi dan mutualistis, individu ditingkatkan melalui komunitas diatur oleh individu. ( John L. Esposito (ed), terj. 1987 : 216).

Disisi lain Allah sebagai pencipta semesta alam tidak membiarkan manusia mengatur komunikasinya dengan sifat lemah yang dibawahnya, namun Dia memberikan akal yang akan membantu dan memandunya dalam mencari ketenangan hidup.

Islam, agama yang diridloi Allah ( Q.S. 5 : 3 ), juga mengatur manusia dalam mencari kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun diakhirat. Karena itu didalam islam ada seperangkat prinsip dan tata nilai etika yang harus dipergunakan umatnya dalam bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat Al Qur'an yang menganjurkan musyawarah (Ali Imran : 159, As Syura : 387, - Kepemimpinan (An Nisa' : 59), Keadilan ( Al Nahl : 90 ), Persamaan ( Al Hujurat : 13 ), Kedudukan manusia di bumi- ( Al Hadid : 5 ), dll. Bukti lainnya adalah kejadian/peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan beliau khususnya dalam hal kemasyarakatan dan kenegaraan. Demikian pula dalam kehidupan para khalifahnyanya dalam menjalankan

roda pemerintahan yang islami.

Islam menghendaki adanya kehidupan yang islami, yakni kehidupan yang nilai-nilai keislaman menjadi referensi sikap, pola pikir, dan kerangka bermasyarakat. Sehingga - dapat dikatakan bahwa tujuan negara dan pemerintahan Islam menerima prinsip-prinsip islam, dan berupaya mewujudkannya dalam sejarah suatu organisasi manusia tertentu. ( John L. Esposito, terj. 1987 : 217 ).

Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut, di negara Indonesia ini telah diadakan kesepakatan luhur antarsemua golongan yang hidup di Indonesia ini yaitu adanya Pancasila sebagai Asas Tunggal. Namun sebuah kesepakatan, seluhur apapun tidak akan banyak berfungsi jika tidak di dudukkan dalam status yang jelas. Karenanya kesepakatan luhur bangsa itu akhirnya dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Sebagai ideologi bangsa artinya setiap warga negara RI terikat oleh ketentuan-ketentuannya yang sangat-mendasar yang tertuang dalam sila yang kelima. Sebagai falsafah negara, Pancasila berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus di ikuti dalam membuat undang-undang dan produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. ( BP\* 7 - PUSAT, 1991 : 163 ).

Dalam status sebagai ideologi bangsa dan falsafah inilah dirasa adanya tumpang tindih antara pancasiladeng

an sebagian sisi kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masalah yang timbul adalah tentang orientasi yang dimiliki oleh langkah-langkah yang di ambil negara. Singkatnya dapat dikatakan bahwa status-Pancasila sebagai "Sumber dari segala sumber" berarti Pancasila bebas menggantikan ajaran-ajaran agama yang sudah baku dengan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan ajaran-islam. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al Maidah ( 5 : 44) :

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (المائدة: ٤٤)

" Dan barang siapa yang menghukumkan tidak dengan apa yang diturunkan Allah, orang itu termasuk orang kafir".

Untuk mengetahui tinjauan islam terhadap pancasila sebagai azas tunggal tersebut, diperlukan penelitian deskriptif tentang konsep azas tunggal tersebut, guna menghindari kejumuhan dari sistem ini yang antara teori dan prakteknya mengalami kesenjangan. Dan untuk selanjutnya diperlukan penelitian secara komparatif untuk mengetahui apakah antara azas ketatanegaraan dalam islam dengan azas pancasila terdapat keserupaan, (similarisasi), kesejalaran (pararelisasi), atau saling menyangkal (falsifikasi).

Urgensi penelitian dan kajian tentang masalah diatas semakin terasa setelah di dalam kepustakaan, menurut hemat penulis, belum dijumpai hasil penelitian dan kajian yang khusus membahas masalah tersebut. OKI, pengkajian ini

bersifat Pure Research yang pada penelitian deskriptif dan penelitian secara komperatif, hasilnya dapat dijadikan bahan perumusan hipotesis bagi penelitian tingkat eksplanatoris, yakni tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara yang menjadi keharusan (what ought to be) - dengan kenyataan (what is).

#### B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dikaji dan dipelajari - di sini adalah Pancasila Sebagai Azas Tunggal yang dikaitkan dengan sistem kenegaraan dalam islam. Atau dengan kata lain, Pancasila Sebagai Azas Tunggal di tinjau dari sistem kenegaraan dalam islam.

#### C. Pembatasan Masalah

Masalah yang di ajukan penulis, Pancasila Sebagai Azas Tunggal di tinjau dari sistem kenegaraan dalam islam, masih terlalu umum dan paly face (mencakup banyak segi) , sehingga diperlukan determinasi dan demitasi agar kajiannya bersifat jelas dan mendasar.

Study yang di rencanakan ini akan membatasi diri - pada :

1. Sejarah lahirnya pancasila.
2. Pancasila sebagai azas tunggal dalam suatu pemerintahan
3. Prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam islam.

#### D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah - tersebut di atas perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah deskripsi pancasila sebagai azas tunggal ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap pancasila - sebagai azas tunggal ?

#### E. Tujuan studi

Dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan studi ini adalah :

1. Mendeskripsikan pancasila sebagai azas tunggal.
2. Menentukan letak persamaan dan perbedaan antara pancasila sebagai azas tunggal dengan sistem kenegaraan dalam islam.

#### F. Kegunaan studi

Setelah studi ini selesai di harapkan hasil-hasilnya berfungsi dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal :

1. Dapat di jadikan bahan untuk menyusun hipotesis berikutnya, untuk mengetahui intensitas pengaruh sistem pancasila sebagai azas tunggal terhadap sistem kenegaraan di dalam islam atau tentang sebab-sebab terjadinya kesenjangan antara das sein dan das solen pada sistem azas-tunggal.
2. Dapat di jadikan alat penilaian awal terhadap sistem - pancasila sebagai azas tunggal dan menambah bahan pustaka tentang perbandingan hukum tata negara.

## G. Metodologi

### 1. Data yang akan digali

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian Asas Tunggal dan latar belakang lahirnya.
- b. Tujuan Asas Tunggal.
- c. Sistem kenegaraan dalam Islam tentang kekuasaan pemerintahan Islam sebagai tolok ukur dalam meninjau Pancasila sebagai Asas Tunggal.

### 2. Sumber data

Dalam studi ini seluruh data yang diperlukan bersumber pada literatur dan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji antara lain :

Abul A'la Al-Maududi, Al-Khalifah Wa al-Mulk, terj. Muhammad al-Baqir (Khalifah dan kerajaan), Mizan, Bandung, 1990.

\_\_\_\_\_, The Islamic Law and Constitution, terj. Drs. Asep Hikamat, Mizan, Bandung, 1990.

Abul Qodir Audah, At-Tasyri'ul Jina'i al Islami, Maktabah Darul Ghurubah, Kairo, 1963.

Deliar Noer, Islam Pancasila Dan Asas Tunggal, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1983.

Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, 1986.

Dahlan Thaib SH, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, AMPYK PN, Yogyakarta, 1991.

DR. Hamidullah, Abul A'la Al Maududi, Dr. Abdul Karim Zaidan, Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Prof. DR. T M. Hasbi Assiddeqy, Pengantar Hukum Islam I, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

\_\_\_\_\_, Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta, 1974.

Prof. Muhammad Yusuf Musa, Politik dan Negara Dalam Islam, Al-Ikhlash, Surabaya, 1990.

Muhammad Asad, Minhaj Al-Islam Fi al-Hukm, terj. Afif Muhammad (Sebuah kajian tentang sistim pemerintahan Islam), Pustaka Bandung, 1985.

Drs. Rozikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Wali Songo Pres, Jakarta, 1992.

Sudirman Tebba, Islam Orde Baru, Tiara Wacana Yogja, 1993.

### 3. Data yang berhasil dihimpun

Data-data yang berhasil dihimpun dari literatur yang ada meliputi :

#### a. Sistim pemerintahan Islam :

- Definisi Dan Tujuan Negara Islam
- Sumber-sumber hukum Islam
- Dasar-dasar Negara Islam

#### b. Pancasila sebagai Asas Tunggal :

- Pengertian Pancasila dan sejarah perumusannya
- Pengertian Asas Tunggal dan latar belakang lahirnya Asas Tunggal
- Tujuan dicetuskannya Asas Tunggal
- Ormas dan Orpol berasaskan Pancasila.



#### 4. Teknik Penggalian Data

Penulis berusaha menginventarisir pendapat para ahli yang berkompentensi dalam bidang ini beserta dasar pemikirannya mengenai asas tunggal dalam sistem kenegaraan Islam. Selanjutnya diadakan analisis tentang relevansi sistem Pancasila sebagai Asas Tunggal terhadap Asas Tunggal dalam kenegaraan Islam.

#### 5. Metode analisis data

Data-data yang diperoleh dari buku dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data secara editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh secara cermat, dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan satuan atau kelompok data.
- b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan sistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan sebelumnya guna untuk merumuskan deskripsi asas tunggal.
- c. Penemuan hasil, yaitu mengadakan analisis lanjutan dengan menggunakan dalil, kaidah, teori, sehingga diperoleh simpulan tertentu dengan menggunakan metode, yaitu :
  - Metode deskripsi, yaitu menggambarkan ketentuan yang ada mengenai asas negara Pancasila dan asas negara dalam sistem kenegaraan Islam.

Metode deduktif, yaitu mengemukakan teori atau dalil yang bersifat umum dan kemudian ditarik suatu simpulan yang bersifat khusus, yakni dapat diketahui bahwa antara sistem asas tunggal Pancasila dan asas tunggal dalam Islam sama-sama mempunyai dasar sendiri.

- Metode induktif, yaitu mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, berupa generalisasi.
- Metode komparatif, yaitu meneliti hubungan beberapa data yang diperoleh, kemudian membandingkan kedua data tersebut, dan selanjutnya dirumuskan simpulannya.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini terarah, maka penulis menguraikannya bab demi bab. Dari bab-bab tersebut dipecahkan menjadi sub-sub bab, kemudian dipecahkan lagi menjadi anak sub bab. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi gambaran umum yang memuat pola dasar skripsi ini, meliputi : Latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, data, sumber data, metode analisis data, dan sistematika pembahasan.

- Bab II** : Bab ini berkisar pada pembahasan yang bersifat umum (landasan teori) untuk menuju pada pembahasan selanjutnya yang bersifat khusus. Bab ini memuat : Negara Islam dan tujuannya, sumber-sumber hukum Islam, Dasar-dasar pemerintahan Islam.
- Bab III** : Merupakan bahasan inti yang dijadikan obyek tinjauan hukum Islam, yaitu memuat Pancasila sebagai Asas Tunggal.
- Bab IV** : Analisa hukum Islam terhadap Pancasila sebagai asas Tunggal, yang memuat tinjauan terhadap Pancasila dan tinjauan terhadap Asas Tunggal P Pancasila.
- Bab V** : Merupakan bab penutup sebagai akhir penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.